

SINOPSIS

Pelaksanaan kebijakan perencanaan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005/2006 dilatarbelakangi adanya tuntutan reformasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yaitu mewujudkan *good government*, pemerintahan yang bersih, berwibawa, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan publik (*public services*).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan memahami fenomena dan pengumpulan data secara observasi, kepustakaan dan analisis data dari data primer maupun sekunder dengan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perencanaan sumber daya manusia yang ada lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perencanaan sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2005/2006 melalui langkah-langkah berikut ini :

- a. Peningkatan pendidikan formal PNS melalui beasiswa, ijin belajar atau tugas belajar.
- b. Studi banding, loka karya, seminar dan diklat teknis lainnya.
- c. Bantuan penyaringan STPDN/IIP dan seleksi Program Magister bagi para pegawai yang dinilai layak untuk mengikuti program pendidikan lanjutan tersebut.

Adapun faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi faktor penghambat, yaitu : bentuk dan organisasi pemerintahan daerah yang masih bersifat konvensional sehingga mengarah kepada hierarki organisasi, dimana sumber daya manusia masih dianggap sama dengan faktor sumber daya lainnya; kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil yang masih jauh dari standar kompetensi dan profesionalitas dalam suatu organisasi pemerintahan; masih berkembangnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penerimaan calon pegawai; penempatan dan mutasi pegawai serta promosi jabatan/jenjang karier seorang pegawai dan faktor pendukung yang berupa : meningkatnya perhatian para pimpinan dan instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas SDM –PNS yang ada di lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu; adanya perubahan orientasi mengenai isu tentang sumber daya manusia dan perubahan paradigma aparatur pemerintahan; pimpinan semakin menyadari tentang pentingnya peran atasan dalam meningkatkan motivasi kerja para bawahannya.

Berdasarkan langkah-langkah dalam perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan ketrampilan dan efisiensi pegawai dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pelayanan publik. Hendaknya perencanaan sumber daya manusia di Pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan serta lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan public. Praktek budaya KKN baik dalam hal penerimaan calon pegawai (*recruitment*), penempatan dan mutasi pegawai serta promosi jabatan hendaknya secara maksimal dapat dihilangkan agar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan benar-benar memenuhi syarat kompetensi dan akuntabel.